



SIARAN PERS
SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT (SPKS)

**LANTIK KEPENGURUSAN SPKS WILAYAH SULBAR, SEKJEN SPKS SINGUNG
STRUKTUR PASAR YANG OLIGOPOLI DI DALAM INDUSTRI SAWIT HINNGGA
BERDAMPAK PADA HARGA SAWIT**

Mamuju – Sulbar, 14 Agustus 2022, Kepengurusan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Wilayah provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yaitu Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu periode 2022 – 2026 Resmi di lantik oleh Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto, pada tanggal 9 Agustus 2022 bertempat di Hotel Maleo Mamuju.

Acara ini di rangkaikan dengan workshop Tataniaga TBS Petani Sawit Wilayah Sulbar serta di hadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Sulbar, Kepala Dinas Perkebunan Prov. Sulbar, SPOS Indonesia – Yayasan Kehati dan perwakilan petani sawit dari Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu.

Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto dalam sambutannya mengatakan kehadiran SPKS di wilayah Sulbar harus mampu memainkan peran dalam mendukung dan bekerjasama dengan semua pihak dalam membangun praktek- praktek sawit berkelanjutan di tingkat petani sawit. Dia berpesan kepada pengurus SPKS wilayah Sulbar agar bekerja dan memainkan peran aktif mulai dari level bawah, level tengah dan level atas. Di level bahwa SPKS harus membangun kelompok – kelompok petani sawit, bangun koperasi dan memperkuat SDM petani melalui pelatihan – pelatihan di tingkat lapangan atau di desa-desa, serta memfasilitasi kemitraan yang adil antara koperasi dengan perusahaan, pada level tengah SPKS harus bisa mendorong kebijakan di tingkat daerah yang menguntungkan dan patuh kepada hak-hak asasi petani serta bisa masuk dalam penetapan harga TBS di tingkat provinsi, untuk level atas SPKS berperan melakukan advokasi pada kebijakan-kebijakan yang belum berpihak kepada petani sawit.

Mansuetus Darto, dalam sambutan juga menyingung tantangan sawit kedepanya ada dua yaitu struktur pasar yang oligopoli dan juga over produksi, terkait dengan masalah struktur pasar yang oligopoly bisnis sawit nasional di kuasai dan di control hanya sekitar 5 perusahaan besar, jadi ketika 5 perusahaan ini bermain saja dalam bersepakat dalam permainan pembelian sawit dampaknya akan sampai kepada petani sawit, ini juga bisa

di katakan salah satu faktor yang mengakibatkan rendahnya harga TBS juga di petani sawit tidk semua factor pada kebijakan dari pemerintah. Di wilayah sulbar kami dengar hanya ada 1 perusahaan besar yang bermain akibatnya selama ini harga TBS petani sawit selalu rendah di dibandingkan dengan wilayah Sumatera dan Kalimantan, disini perlu pengawan Kerjasama antara pemerintah dan juga Lembaga petani sawit dan mendorong kejelasan rantai pasok agar kita mengetahui buah sawit petani kemana saja atau perusahaan mana saja.

Sementara itu terkait dengan masalah yang kedua over produksi saat ini kita Sudah mengalami ini sementara pasarnya terbatas dan sawit di negara-negara lain ikut tumbuh, pesan saya untuk petani sawit di Sulbar kalau memiliki tanaman komoditas lain seperti kakao, kelapa jangan lagi dikonversi ke sawit, cukup kelola sawit yang sudah ada dan fokus pada peningkatan produktifitas petani.

Hj. Siti Suraidah Suhardi, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, dalam sambutannya mengatakan pemerintah harus hadir dan berkomitmen dalam hal kesejahteraan para petani sawit Sulawesi Barat, Kita juga ingin mendorong ada perbaikan pembelian TBS petani sawit di sulawesi barat bisa setara dengan wilayah-wilayah yang lain, karena selama ini harga sawit sangat rendah sekali di dibandingkan dengan wilayah Kalimantan dan sumatera.

Syamsul Maarif Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar mengatakan dalam sambutannya menyambut baik kehadiran SPKS di Wilayah Sulbar serta berharap bisa menjadi mitra dalam mendorong kemajuan petani sawit dan penyelesain masalah petani sawit di Sulbar.

Syamsul Maarif juga mengatakan bahwa saat ini di Provinsi Sulbar sudah membuat kebijakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Sawit Berkelanjutan Sulbar sesuai dengan peraturan Gubernur No. 188 Tahun 2020, target kami melalui RAD ini untuk perbaikan tatakelola pada petani sawit yang sejahtera an juga berkelanjutan.

“kami harapkan dari SPKS dan asosiasi petani sawit bisa bersama-sama mendukung rencana pemerintah untuk memperbanyak kelembagan petani sawit, serta peningkatan SDM petani melalui pelatihan-pelatihan”.

Terkait dengan penetapan harga TBS petani sawit sesuai dengan permentan No 1 Tahun 2018, saat ini memang masih banyak perdebatan terkait denagn pasal perpasal dari permentan itu, tetapi kita harapkan semua pihak bisa mendukung proses penetapan harga TBS ini, kita akan masukan SPKS dalam penetapan harga TBS kedepanya.

Tetapi yang juga penting bagaimana petani sawit bisa berkelompok agar harga TBS yang ditetapkan bisa diterima dengan baik.

Sementara itu Ketua SPKS Sulbar Irfan mengatakan bahwa agenda terdekat SPKS di Sulbar adalah mengawal penetapan harga TBS petani sawit mulai dari proses penetapan yang difasilitasi oleh Disbun, yang menjadi masalah dari harga TBS selama ini perusahaan tidak pernah mengikuti harga yang disepakati dan juga perusahaan tidak pernah transparan dalam proses penetapan harga misalnya tidak pernah menunjukkan invoice penjualan CPO mereka padahal sesuai dengan Permentan No 1 tahun 2018 perusahaan wajib menyampaikan dan menunjukkan invoice di dalam rapat penetapan harga TBS.

Tentang SPKS:

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) adalah organisasi petani kelapa sawit di Indonesia yang berkomitmen untuk memperkuat skala keberlanjutan, kesejahteraan dan kemandirian petani melalui pembangunan kapasitas, kelembagaan ekonomi dan fasilitasi akses petani. SPKS saat ini berada di 11 Kabupaten dan 7 Provinsi yang memiliki perkebunan sawit: Kabupaten Labura, Rokan Hulu, Siak, Pelalawan, Kuansing, Tanjabar, Sanggau, Sekadau, Sintang, Paser, Kobar dan Seruyan.

Kontak Media :

Sabarudin - Departemen Organisasi dan Anggota

Sekretariat Nasional SPKS :

Tel: 0251-8571263

WA: 0822-7488-6619

Email: info.spksnasional@gmail.com

Website: www.spks.or.id